

LAPORAN KEUANGAN NILAI TAMBAH
SEBAGAI ALTERNATIF LAPORAN KEUANGAN KONVENSIONAL
DALAM PENILAIAN KINERJA KEUANGAN PT INDOSAT
SEBELUM DAN SESUDAH PRIVATISASI

Oleh:
Yasir Niti Samudro¹

Abstract

Government policy to privatize State Owned Enterprise (SOE's) INDOSAT in 2002 emerging controversy between government as majority stockholders with other INDOSAT stakeholders mainly employee and public society. Focal protest was nationalism issue in relation with state security because the new majority stockholder is Singapore Technology and Telemedia (STT) notably as foreign agent. The subject of this paper is not concerning state security issue but to asses financial performance of INDOSAT before and after its privatization using value added statement analysis. Whether the privatization of this telecommunication company end with financial benefits or improve value added to every stakeholders are the main analysis of this article.

Pendahuluan

Privatisasi PT Indosat pada tahun 2002 telah banyak mengundang kontroversi sehubungan dengan *strategic sale*-nya kepada Singapore Technology and Telemedia (STT). Ada dua alasan besar kenapa pemerintah menjual sahamnya pada PT Indosat, yang pertama dalam rangka menutupi defisit APBN dan kedua menjadikan Indosat perusahaan publik yang sehat dengan manajemen yang profesional. Tulisan ini ingin melihat apakah privatisasi tersebut membawa perbaikan kinerja keuangan perusahaan dilihat dari sisi nilai tambah. Biasanya sumber data utama untuk menilai kinerja keuangan perusahaan adalah laporan keuangan konvensional.

Melalui laporan keuangan konvensional, yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi dan laporan arus kas dapat diukur dan diungkapkan mengenai:

- o Likuiditas;
- o Profitabilitas
- o Efisiensi/ aktivitas, dan

¹ Staf pada Pusat Penelitian Ekonomi dan Keuangan, Badan Pengkajian Ekonomi Keuangan dan Kerjasama Internasional, Departemen Keuangan

o *Leverage*

Dalam membaca laporan keuangan tersebut masyarakat umumnya masih sulit dalam menentukan seberapa besar kontribusi perusahaan terhadap para *stakeholder*-nya (pemegang saham, karyawan, pemerintah, pemasok & kreditor).

Meskipun telah lama dan lazim digunakan namun ketiga bentuk laporan diatas tidak dapat segera memberikan informasi mengenai distribusi keuntungan terhadap kelompok-kelompok *stakeholder* yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam mengelola sumber daya perusahaan. Kelihatannya diperlukan laporan keuangan yang dapat mengukur kinerja perusahaan dengan memperlihatkan distribusi keuntungan tidak hanya kepada pemegang saham tetapi juga terhadap kelompok pekerja, pemodal dan bahkan pemerintah.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) masih merujuk pada teori entitas. Dalam teori entitas, laporan keuangan diposisikan sebagai tameng yang melindungi kepentingan pemilik modal. Laporan laba rugi didisain untuk melaporkan laba, sedang laporan neraca dibuat sedemikian rupa agar bisa mendukung kepentingan pemilik saham.

Adanya kelemahan laporan keuangan konvensional telah mendorong timbulnya laporan nilai tambah (*value added statement/reporting*) yang merupakan alternatif pelaporan yang dapat mengisi kekosongan jenis informasi diatas. Keberadaan laporan nilai tambah berawal dari abad ke 18 di *United States Treasury*. Sejak itu keberadaannya menjadi topik debat apakah dapat dimasukkan sebagai laporan standar akuntansi keuangan atau hanya merupakan pilihan manajemen untuk mengungkapkannya. Pada akhir 1970 konsep nilai tambah ini mulai mendapat perhatian serius di beberapa negara Eropa. Introduksi dan penerapan pajak pertambahan nilai (*value added tax*) di negara Eropa tersebut menjadi pemicu bagi penggunaan laporan nilai tambah, walaupun pada dasarnya penghitungan pajak pertambahan nilai tersebut tidak membutuhkan laporan nilai tambah.

Di Inggris konsep ini mencapai kepopulerannya dengan adanya publikasi *Corporate Report*, sebuah paper diskusi yang disusun oleh panitia kerja dari badan akuntansi Inggris. Paper ini dipublikasikan pada Bulan Agustus tahun 1975 oleh Accounting Standards Steering Committee (sekarang Accounting Standards Committee). Dalam publikasi tersebut direkomendasikan penggunaan laporan nilai tambah dengan dua alasan utama, yang pertama sebagai cara yang mudah dan cepat untuk memposisikan keuntungan pada sudut pandang yang benar jika dihubungkan sebagai hasil usaha bersama antara modal, manajemen dan para pekerja dalam suatu perusahaan. Kedua, sebagai alat yang berguna untuk mengukur kinerja dan aktivitas keuangan sebuah perusahaan.

Kerangka Teori Laporan Nilai Tambah

Menurut Choi (Choi & Mueller, 1992) nilai tambah didefinisikan sebagai beda antara nilai output perusahaan dengan nilai input perusahaan. nilai tambah dapat juga diartikan sebagai pertambahan kekayaan yang dihasilkan dari penggunaan produktif sumber daya perusahaan sebelum dialokasikan kepada pemegang saham, pemegang obligasi, kreditor, pekerja dan pemerintah.

Pada dasarnya laporan nilai tambah merupakan modifikasi laporan laba rugi. Laporan laba rugi menghitung laba ditahan (*retained earnings*) sebagai selisih antara penjualan (*sales*) yang dikurangi biaya, pajak dan dividen.

$$R = S - B - DP - W - I - DD - T \quad (1)$$

Dimana	R	=	Laba Ditahan
	S	=	Penjualan
	B	=	Pembelian Bahan & Jasa
	DP	=	Penyusutan
	W	=	Upah & Gaji
	I	=	Bunga
	DD	=	Dividend
	T	=	Pajak

Persamaan nilai tambah didapat dengan menyusun kembali persamaan laba ditahan menjadi

$$S - B = W + I + DP + DD + T + R \quad (2)$$

atau

$$S - B - DP = W + I + DD + T + R \quad (3)$$

Persamaan (2) merupakan format nilai tambah bruto sedangkan persamaan (3) merupakan format nilai tambah neto.

Sisi kiri persamaan (2) dan (3) merupakan nilai tambah, sedangkan sisi kanannya merupakan alokasi nilai tambah diantara partner kerja perusahaan yang terdiri dari kelompok pekerja, kelompok pemegang saham, kelompok pemegang obligasi dan kreditor serta pemerintah.

Keunggulan format nilai tambah bruto yang dikemukakan Morley (1979):

- ❖ Nilai tambah akan lebih obyektif bila menyertakan penyusutan dalam perhitungannya. Obyektivitas ini memberikan keyakinan bagi para pekerja akan validitas laporan nilai tambah untuk menghitung bonus produktivitas, ini dikarenakan para pekerja menilai format bruto mempersempit ruang bagi tindakan manipulasi ataupun normalisasi.
- ❖ Format bruto memberi kemungkinan untuk melihat nilai reinvestasi yang tergambar pada pos penyusutan dan laba ditahan. Dengan demikian format bruto lebih bersifat pengungkapan penuh (*full disclosure*)

- ❖ Format bruto memiliki visi dan preferensi yang sama dengan yang dimiliki oleh para ekonom dalam hal penghitungan pendapatan nasional bruto.

Dilain pihak, format nilai tambah neto juga mempunyai kelebihan yang patut dipertimbangkan, yakni:

- ❖ Format neto mempunyai definisi yang relatif lebih baik bagi pengertian nilai tambah yang akan didistribusikan dibanding format bruto. Format bruto menghasilkan nilai tambah yang ditetapkan lebih tinggi (*overstated*) karena melibatkan unsur Penyusutan.
- ❖ Format neto sesuai dengan prinsip *matching cost against revenue* dalam akuntansi
- ❖ Format neto mengeliminasi perhitungan ganda (*double counting*) yang terjadi bila ada pertukaran aktiva tetap antar dua perusahaan.
- ❖ Format Neto sesuai dengan konsepsi “distribusi keuangan kepada kelompok pekerja, pemilik modal dan pemerintah”.

Perlakuan Pos-pos Tertentu

1. *Nontrading Credits*

Nontrading credits didefinisikan sebagai penerimaan yang didapat bukan dari aktivitas normal perusahaan di bidang jasa, perdagangan atau manufaktur. Contoh *non-trading credits* adalah: penjualan sekuritas; penjualan aktiva yang bukan merupakan persediaan; laba selisih kurs; uang muka dari pemegang saham, direksi, pegawai, perusahaan afiliasi, kreditor, agen, kontrak pembelian; jaminan pelaksanaan kontrak; klaim kerugian dan kerusakan; klaim rabat; klaim restitusi pajak; cicilan pembelian saham; piutang bunga dan pendapatan dividen.

pos *nontrading credits* ini menurut kami bukan merupakan nilai tambah bagi perusahaan. Dengan demikian jumlah *nontrading credits* akan dikoreksi terhadap jumlah laba ditahan.

2. Pos Luar Biasa (*Extraordinary Gains and Losses*)

Menurut Standar Akuntansi Keuangan Indonesia pada PSAK No.25 yang termasuk sebagai pos luar biasa apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Memiliki tingkat abnormalitas yang tinggi dan tidak mempunyai hubungan dengan kegiatan normal perusahaan.
- b. Tidak sering terjadi dalam kegiatan normal perusahaan.

Kedua kriteria tersebut harus selalu dihubungkan dengan sifat dan karakteristik dari kegiatan perusahaan serta faktor geografis perusahaan. Bila hanya salah satu terpenuhi kriteria terpenuhi maka transaksinya dikelompokkan sebagai penghasilan atau beban lain-lain.

PSAK No.25 menyatakan bahwa pos luar biasa harus disajikan setelah laba yang berasal dari kegiatan normal perusahaan, dengan demikian pengguna laporan keuangan dapat

melakukan evaluasi terhadap kinerja perusahaan yang berasal dari kegiatan normal sekaligus juga melihat pengaruh dari pos luar biasa tersebut terhadap perhitungan laba rugi perusahaan. Dalam perhitungan nilai tambah perlakuan pos luar biasa dapat dianalogikan sama dengan pos *non-trading credits* jadi bukan merupakan nilai tambah. Dengan demikian nilainya merupakan koreksi terhadap laba ditahan.

Contoh Menghitung Nilai Tambah (Format Neto)

A. Laporan laba rugi konvensional perusahaan untuk tahun 200X:			
Penjualan			Rp. 5.000.000
Dikurangi:	Pemakaian Bahan	Rp. 2.000.000	
	Gaji dan Upah	1.000.000	
	Jasa	500.000	
	Bunga	300.000	
	Penyusutan	200.000	
Laba Sebelum Pajak			Rp. 1.000.000
Pajak Penghasilan (misal 30%)			<u>300.000</u>
Laba setelah pajak			Rp. 700.000
Dikurangi Dividen			<u>200.000</u>
Laba ditahan tahun 200X			Rp. <u>500.000</u>
B. Laporan nilai tambah untuk tahun tersebut dapat disusun sebagai berikut:			
Penjualan			Rp. 5.000.000
Dikurangi Pemakaian Bahan, Jasa dan Penyusutan			<u>2.700.000</u>
Nilai tambah yg tersedia			Rp. <u>2.300.000</u>
Distribusi nilai tambah:			
Kepada para pekerja			1.000.000
Kepada pemilik modal			
Bunga	Rp. 300.000		
Dividen	<u>200.000</u>	500.000	
Kepada pemerintah		300.000	
Laba ditahan		<u>500.000</u>	
Nilai Tambah			Rp. <u>2.300.000</u>

Kelebihan dan Kegunaan Lain dari Laporan Nilai Tambah

Meskipun konsep nilai tambah belum mencapai tingkat penggunaan yang meluas dikarenakan belum adanya model laporan yang konvensional, namun beberapa penulis telah menguji beberapa kelebihan dan keterbatasan yang berhubungan dengan laporan nilai tambah. Kelebihan utama laporan nilai tambah terletak pada cakupan teknis multidimensional-nya dibanding model laporan keuangan konvensional. Berikut ini beberapa kelebihan yang dimiliki oleh laporan nilai tambah.

- ❖ Memberikan iklim organisasi yang kondusif bagi pekerja.
- ❖ Alat prediksi yang andal. Rasio yang dibuat berdasarkan nilai tambah dapat digunakan untuk memprediksi dan mendeteksi keadaan ekonomi untuk kepentingan perusahaan.

Beberapa contoh rasio yang dapat digunakan (Morley, 1979):

- Rasio **nilai tambah/upah**. Selain untuk mengukur kontribusi pekerja terhadap nilai tambah yang terjadi, dapat juga digunakan untuk meramalkan

kecenderungan dalam biaya tenaga kerja, selain itu juga dapat digunakan dalam negosiasi gaji.

- Rasio **pajak/nilai tambah** sebagai indikator peran pemerintah dalam perusahaan.
 - Rasio **nilai tambah/penjualan** selain untuk mengukur pengaruh penjualan terhadap nilai tambah juga dapat digunakan untuk menentukan derajat integrasi vertikal pada suatu grup perusahaan. Rasio ini juga dapat dijadikan sebagai indeks daya tahan perusahaan terhadap perubahan pasokan bahan dan jasa.
 - Rasio **nilai tambah/capital employed** dapat digunakan untuk mengukur produktivitas modal yang digunakan dalam perusahaan (Cox, 1978).
 - Rasio **nilai tambah/operating assets** untuk mengukur produktivitas aset operasional
 - Rasio **nilai tambah/penyusutan** sebagai ukuran produktivitas aktiva berwujud
 - Rasio **laba operasional/nilai tambah** sebagai ukuran kontribusi profit terhadap nilai tambah
- ❖ Konsep laporan nilai tambah kurang lebih sama dengan konsep yang digunakan para ekonom untuk menghitung pendapatan nasional. Seperti diketahui untuk menghitung pendapatan nasional salah satu langkahnya adalah dengan menjumlahkan nilai tambah perusahaan-perusahaan.
- ❖ Laporan nilai tambah dapat juga berfungsi sebagai alat ukur untuk menentukan signifikansi sebuah perusahaan dalam suatu perekonomian. Jumlah nilai tambah yang diciptakan perusahaan merupakan tolok ukur yang lebih baik jika dibandingkan dengan penjualan atau modal karena penggunaan kedua pos tersebut dapat menimbulkan misinterpretasi. Contohnya begini, mana yang lebih besar Unilever atau Indofood? Tentunya harus ditentukan dulu besaran mana yang terbaik untuk digunakan sebagai alat ukur. Bisa jadi penjualan merupakan besaran yang tepat, tetapi akan salah persepsinya kalau ternyata sebagian besar penjualan tersebut hanya merupakan media antara untuk biaya pembelian dari perusahaan lain. Beberapa kasus menggunakan *net capital employed* sebagai tolok ukur, mungkin tolok ukur ini relatif lebih baik tapi akan lain ceritanya kalau salah satu perusahaan bergerak di industri yang padat modal.

Kelemahan Laporan Nilai Tambah

Tidak populernya penggunaan laporan nilai tambah bisa jadi karena kelemahan dari laporan tersebut yang dapat dikemukakan disini.

- ❖ Laporan nilai tambah bersandar pada konsepsi yang mungkin saja keliru mengenai perusahaan, yaitu memandang sebuah perusahaan bukan sebagai entitas tapi merupakan kelompok-kelompok partner yang bekerja sama. Faktanya kelompok-kelompok tersebut mempunyai hubungan yang bersifat konflik dalam mengelola

sumber daya perusahaan. Manajer akan selalu berusaha memperbesar keuntungan dengan memperkecil biaya (antara lain upah) yang sangat bertentangan dengan kepentingan pekerja yang ingin mendapatkan upah yang sebesar-besarnya. Dipertanyakan pula mengenai kewajaran mengikutsertakan pemerintah sebagai partner kerja, walaupun hal ini dapat saja dijustifikasi.

- ❖ Laporan nilai tambah berpotensi menimbulkan mispersepsi dalam kasus apabila nilai tambah meningkat tetapi *earning per share* (EPS) menurun. Dalam hal ini pemegang saham sebagai pihak yang paling berkepentingan terhadap EPS seharusnya memandang bahwa laporan nilai tambah bukan merupakan laporan kepada pemegang saham.
- ❖ Keberadaan laporan nilai tambah berpotensi mengarahkan manajemen pada tujuan yang salah yakni memaksimalkan nilai tambah perusahaan. Ilustrasinya sebagai berikut: misalkan sebuah perusahaan membeli komponen elektronik yang harga satuannya Rp.5.000,- kemudian timbul pertanyaan “berapa biayanya kalau kita buat sendiri?” Ternyata untuk membuat sendiri diperlukan *direct material* seharga Rp.3.000,- dan *direct labor* Rp.8.000,- (*overhead* diabaikan). Dalam kasus ini normalnya seorang manajer akan melakukan *outsourcing*. Tidak demikian halnya dengan seorang *value added maximizer*, ia akan mengambil keputusan yang tidak efisien dengan memproduksi sendiri komponen elektronik tersebut dengan dua pertimbangan yakni populer di mata karyawan dan meningkatkan nilai tambah perusahaan. Di lain pihak selisih inefisiensi sebesar Rp.6000 (8000+3.000–5.000) merupakan kerugian yang harus ditanggung pemegang saham.

LAPORAN DAN PENILAIAN NILAI TAMBAH PADA PT INDOSAT Tbk

Beranjak dari kerangka teori laporan nilai tambah sebagai alternatif laporan keuangan konvensional uraian berikut ini menjelaskan aplikasi laporan nilai tambah dalam menilai kinerja keuangan PT Indosat Tbk sebelum dan sesudah privatisasi.

Dalam studi kasus PT Indosat Tbk kami menggunakan analisa tren dan rasio terhadap nilai tambah antara tahun 2001 sampai dengan 2003. Tahun 2001 dipilih karena pada tahun tersebut PT Indosat masih dalam keadaan “normal” karena pemerintah belum melepas saham mayoritas. Tahun 2002 adalah saatnya terjadinya “*turbulence*” privatisasi, sedangkan tahun 2003 adalah tahun “*rebound*” Indosat sebagai perusahaan konsolidasi dengan manajemen dan kepemilikan baru. Analisis berikut ini difokuskan pada analisa kinerja keuangan yang dilihat dari tren nilai tambah di PT Indosat Tbk sebelum dan sesudah privatisasi.

Latar Belakang Perusahaan

Perusahaan ini dibeli oleh Pemerintah Indonesia dari International Telephone and Telegraph (ITT) pada tahun 1980. Sebagai BUMN yang bergerak di bidang telekomunikasi, Indosat memiliki pasar potensial yang besar karena baru 18% kebutuhan telekomunikasi Indonesia terpenuhi.

Pada September 2002 pemerintah melalui *strategic sale* menjual 41.94%² saham Indosat seharga Rp.5,62 triliun kepada Singapore Technology and Telemedia (STT). STT yang masuk dengan menunggangi Indonesia Communication Ltd, praktis menjadi pemegang saham mayoritas. Komposisi kepemilikan sisa saham di Indosat kemudian menjadi: Pemerintah RI (15%), *domestic retails*/perorangan (0,72%), *domestic institutions*/badan (6,29%), dan Bank of New York (6,94%). Penggunaan Indonesia Communication Ltd merugikan Pemerintah Indonesia dari sisi pajak, karena sebagai perusahaan yang bermarkas di Mauritius – negara *tax heaven* Indonesia Communication Ltd membayar pajak dengan tarif yang lebih rendah ke Pemerintah Indonesia.

Sebelum menjual sahamnya di Indosat, pemerintah mempercantik Indosat dengan mengakuisisi 100% saham Satelindo. Di Bulan September 2000 kepemilikan Indosat di Satelindo hanya 7,5%. Pada Februari 2001 Indosat dan Telkom melakukan tukar guling kepemilikan Satelindo. Demi mendapatkan 22,5% saham Satelindo dari Telkomsel³, Indosat harus membayar sebesar Rp.1,73 triliun. Langkah ini kemudian diikuti dengan membeli 13,5% saham Satelindo dari Bimagraha Telekomindo⁴ senilai Rp.1,03 triliun. Agar genap kepemilikan atas Satelindo menjadi 100%, Indosat kemudian membeli 25% saham Satelindo dari Deutsche Telekom Asia senilai Rp 3,02 triliun. Kalau dilihat dari jumlah diatas wajarlah kalau banyak kalangan yang menilai harga sebesar Rp.5,62 triliun ke STT menjadi terlalu murah.

Penjualan saham ini kemudian menimbulkan gelombang protes baik dari karyawan maupun masyarakat luas karena pemerintah dianggap kurang memiliki rasa nasionalisme dengan melepas BUMN telekomunikasi yang bisa jadi merupakan ancaman serius terhadap keamanan rahasia negara. Namun sekali lagi diingatkan

² Atau sejumlah 434.250.000 lembar saham

³ Anak perusahaan PT Telkom

⁴ Anak perusahaan Grup Bimantara

bahwa tulisan ini hanya menilai kinerja keuangan PT Indosat Tbk dari tren nilai tambah yang dihasilkannya.

Analisa Nilai Tambah PT Indosat Tbk Sebelum dan Sesudah Privatisasi

Dari tabel 1 yang merupakan Laporan Laba Rugi Komparasi PT Indosat Tahun 2001-2003 terlihat adanya fluktuasi laba bersih dari Rp.1,45 triliun pada tahun 2001 anjlok ke Rp.336 milyar pada 2002 kemudian *rebound* ke Rp.1.57 triliun pada 2003, walaupun pendapatan usaha pada ketiga tahun tersebut terus meningkat.

Tabel 1

Laporan Laba Rugi Komparasi PT Indosat Tbk

untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2003

	Dalam milyar rupiah		
	<u>2001</u>	<u>2002</u>	<u>2003</u>
Pendapatan Usaha ⁵	5.138,1	6.767,0	8.235,3
Beban Usaha			
Penyusutan	1.011,6	1.723,9	2.038,0
Karyawan	496,3	687,2	1.028,5
Kompensasi kepada penyelenggara & penyedia jasa telekomunikasi	597,5	609,6	670,0
Administrasi & Umum	267,3	454,4	498,0
Pemeliharaan	286,6	303,0	308,1
Sewa Sirkuit	133,8	192,2	145,9
Pemasaran	100,4	148,9	242,3
Beban Jasa Telekomunikasi Lainnya	<u>415,8</u>	<u>735,9</u>	<u>972,1</u>
Jumlah Beban Usaha	3.309,3	4.855,1	5.902,9
Laba Usaha	1.828,8	1.911,9	2.332,4
Penghasilan (Beban) lain-lain			
Pendapatan Bunga	642,1	822,3	147,7
Laba Kurs – Bersih	524,1	393,8	200,1
Amortisasi Goodwill	(321,2)	(753,5)	(252,9)
Beban Bunga	(402,5)	(566,9)	(838,7)
Beban Transformasi Indosat			(48,8)
Penyisihan Piutang Bunga Ragu-ragu Obligasi Konversi	(19,7)	(287,8)	0,0
Jasa Konsultan	(259,8)	0,0	0,0
Penyesuaian Piutang Usaha dari Telkom	0,0	(118,0)	0,0
Lain-lain – bersih	<u>14,4</u>	<u>(130,5)</u>	<u>(3,3)</u>
Penghasilan (Beban) lain-lain - bersih	177,4	(640,6)	(795,9)
Bagian Laba Bersih Perusahaan Asosiasi	<u>132,3</u>	<u>72,3</u>	<u>33,7</u>
Laba Sebelum PPh	2.138,4	1.343,5	1.570,2
Manfaat (Beban) PPh – net	<u>(412,2)</u>	<u>(774,4)</u>	<u>22,6</u>
Laba sebelum hak minoritas atas laba bersih			
anak perusahaan dan laba pra-akuisisi	1.726,3	569,2	1.592,8
Hak Minoritas atas laba bersih anak perusahaan	(273,5)	(27,1)	(22,7)
Laba pra-akuisisi	<u>0,0</u>	<u>(205,9)</u>	<u>0,0</u>
Laba bersih	1.452,8	336,2	1.570,1

Sumber: Indosat Annual Report 2003 (diolah)

⁵ Terdiri atas pendapatan Selular, Telepon Internasional, MIDI dan Jasa Lainnya. Pada Tahun 2003 komposisinya berturut-turut sebagai berikut 62,1%, 22%, 14,9%, dan 1%.

Anjloknya laba bersih pada tahun 2002 dapat dimengerti karena adanya peningkatan yang signifikan pada pos amortisasi goodwill, penyisihan piutang bunga ragu-ragu obligasi konversi, penyesuaian piutang usaha dari PT Telkom, pos lain-lain – net, dan laba pra akuisisi.

Peningkatan pos amortisasi goodwill terjadi akibat proses akuisisi Satelindo. Sebelum tahun 2003 amortisasi goodwill dilakukan untuk periode 5 tahun. Karena dipandang bisnis seluler akan terus berkembang maka manajemen menerapkan amortisasi selama jangka waktu 15 tahun untuk akuisisi Indosat sejak tahun 2003.

Penyisihan piutang bunga ragu-ragu obligasi konversi PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia sebesar Rp.287,8 milyar diimbangi dengan peningkatan pendapatan bunganya sebesar Rp.278,1 milyar. Penyesuaian piutang usaha dari Telkom merupakan rekonsiliasi nilai piutang per 31 Desember 2002. Penyesuaian ini dilakukan berkaitan dengan akumulasi piutang untuk panggilan internasional dimana PT Telkom tidak dapat menagih pelanggannya, dimana jumlah tersebut belum dicadangkan oleh Indosat. Sehubungan dengan penyesuaian tersebut, Indosat melakukan rekonsiliasi atas akumulasi piutang dengan Telkom setiap triwulan (sebelumnya dilakukan tahunan) untuk menghindari penyesuaian serupa di masa datang.

Pos lain-lain – net terjadi karena transisi penerapan Standar Akuntansi Keuangan 55 tentang akuntansi instrumen derivatif dan aktivitas lindung nilai⁶. Laba pra akuisisi terjadi akibat akuisisi Satelindo, Bimagraha dan IM3.

⁶ Efektif sejak 1 Januari 2001, SAK 55 menetapkan standar akuntansi dan pelaporan dimana setiap instrumen derivatif dicatat sebagai aktiva atau kewajiban pada neraca dan diakui sebesar nilai wajar masing-masing kontrak. SAK 55 mengharuskan perubahan nilai wajar instrumen derivatif diakui pada tahun berjalan kecuali untuk lindung nilai tertentu yang memungkinkan laba atau rugi instrumen derivatif saling hapus dengan aktiva dan kewajiban yang dilindungi dalam laporan laba rugi.

Tabel 2

Laporan Nilai Tambah Komparasi PT Indosat Tbk
 untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2003

dalam milyar rupiah

AKUN	2001	% thdp Nilai Tambah	2002	% thdp Nilai Tambah	2003	% thdp Nilai Tambah
Pendapatan Usaha	<u>5.138,1</u>		<u>6.767,0</u>		<u>8.235,3</u>	
Kompensasi kepada penyelenggara & penyedia jasa telekomunikasi	597,5		609,6		670,0	
Sewa Sirkuit	133,8		192,2		145,9	
Beban Jasa Telekomunikasi lainnya	415,8		735,9		972,1	
Penyusutan	<u>1.011,6</u>		<u>1.723,9</u>		<u>2.038,0</u>	
	2.158,8		3.261,6		3.826,0	
Nilai Tambah yang tersedia untuk didistribusikan dan dicadangkan	<u>2.979,3</u>		<u>3.505,4</u>		<u>4.409,3</u>	
Diaplikasikan sebagai berikut:						
Kepada Karyawan	496,3	16,66%	687,2	19,61%	1.028,5	23,33%
Kepada pemilik modal						
Beban Bunga	402,5	13,51%	566,9	16,17%	838,7	19,02%
Dividen	581,1	19,50%	151,3	4,32%	753,6	17,09%
Kepada Pemerintah (PPH)	412,2	13,84%	774,4	22,09%	(22,6)	-0,51%
Laba Ditahan	<u>2.400,1</u>	80,56%	<u>2.483,4</u>	70,85%	<u>2.189,3</u>	49,65%
Aplikasi nilai tambah	4.292,1		4.663,2		4.787,5	
Koreksi Non Trading Credits						
Pendapatan Bunga	642,1		822,3		147,7	
Laba (Rugi) Kurs	524,1		393,8		200,1	
Bagian Laba Bersih Persh. Asosiasi	132,3		72,3		33,7	
Lain-lain – net	<u>14,4</u>		<u>(130,5)</u>		<u>(3,3)</u>	
Koreksi	1.312,8	-44,06%	1.157,9	-33,03%	378,2	-8,58%
Nilai Tambah	<u>2.979,3</u>	100,00%	<u>3.505,4</u>	100,00%	<u>4.409,3</u>	100,00%

Sumber: Indosat Annual Report 2003 (diolah)

Laporan Nilai Tambah Komparasi Tahun 2001-2003 yang terlihat pada tabel 2 menyatakan dengan jelas bahwa porsi nilai tambah yang dinikmati karyawan dan kreditor semakin meningkat selama 2001-2003. Beban karyawan ini termasuk gaji tetap, manfaat, tunjangan, pensiun, biaya tunjangan cuti tahunan, pajak penghasilan karyawan, dan asuransi. Peningkatan biaya karyawan terutama didorong oleh meningkatnya gaji dan tunjangan karyawan serta kenaikan jumlah karyawan dari 5.550 di tahun 2001 menjadi 5.980 pada tahun 2002. Beban karyawan ini meningkat sebagai

akibat beban yang terkait dengan program pensiun dini dan hak-hak karyawan secara hukum yang berkaitan dengan privatisasi Indosat. Karena proses merger vertikal maka pada tahun 2004 beban karyawan akan semakin tinggi sebagai akibat dari program persamaan kompensasi karyawan di seluruh segmen usaha, pengunduran dini serta hak-hak karyawan secara hukum.

Peningkatan porsi kreditor yang terlihat dalam beban bunga disebabkan oleh peningkatan jumlah hutang jangka panjang serta hutang obligasinya. Hutang baru diperoleh dari Bank Mandiri, BNI, dan BCA.

Sedangkan porsi pemegang saham yang direpresentasikan oleh dividen mengalami penurunan pada tahun 2002 menjadi hanya 4,31% dari total nilai tambah, kemudian *rebound* ke 17,09% pada tahun 2003. Penurunan drastis pada tahun 2002 terjadi karena kecilnya laba bersih membuat Indosat hanya sanggup membayar dividen sebesar Rp.29,2 per lembar saham, dibandingkan dengan tahun 2001 (Rp.112,2) dan tahun 2003 (Rp.145,55).

Jumlah pajak yang meningkat sangat signifikan pada 2002 adalah sebagai akibat kewajiban Indosat membayar pajak atas keuntungan penjualan Telkomsel dalam Transaksi Kepemilikan Silang. Indosat mencatat Transaksi Kepemilikan Silang Telkomsel dengan Telkom sebagai proses reorganisasi dari perusahaan-perusahaan yang saham mayoritasnya dimiliki pemerintah dengan menggunakan metode penyatuan kepemilikan.

Fluktuasi pajak selama 2001, 2002, dan 2003, terutama akibat perbedaan antara Laporan Keuangan Komersil dan Laporan Keuangan Pajak hasil dari Transaksi Kepemilikan Silang pada tahun 2001, akuisisi Satelindo di tahun 2001 dan 2002, dan merger Indosat, Satelindo, Bimagraha, dan IM3 di tahun 2003.

Beban pajak menurun dari Rp774,4 miliar di tahun 2002 menjadi manfaat pajak (lebih bayar) sebesar Rp22,6 miliar di tahun 2003. Manfaat pajak tersebut terutama disebabkan oleh pembalikan kewajiban pajak tanggungan bersih dari anak-anak perusahaan yang bergabung sebesar Rp1.142,3 miliar pada tanggal penggabungan usaha.

Nominal laba ditahan relatif stabil selama 2001-2003, sementara porsi nilai tambahnya terus menurun dari 80,56% menjadi 70,85% di 2002 kemudian turun lagi menjadi 49,65%. Karena laba ditahan dalam konteks nilai tambah diasosiasikan sebagai

“nilai yang ditanam dalam perusahaan” maka dalam hal ini Indosat dapat diindikasikan cenderung semakin mengutamakan stakeholdersnya.

Tabel 3

Beberapa Rasio Nilai Tambah Komparasi PT Indosat Tbk
untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2003

No	Rasio	2001	2002	2003
1	Nilai Tambah/ Karyawan	600,35%	510,06%	428,71%
2	Pajak/ Nilai Tambah	13,84%	22,09%	-0,51%
3	Nilai Tambah/ Pendapatan Usaha	57,98%	51,80%	53,54%
4	Nilai Tambah/ Penyusutan	294,51%	203,33%	216,35%

Sumber: Indosat Annual Report 2003 (diolah)

Rasio nilai tambah per upah secara sederhana dapat diartikan sebagai banyaknya unit nilai tambah yang dapat dihasilkan oleh setiap unit karyawan. Pada kasus Indosat terjadi kecenderungan yang menurun. Pada tahun 2001, satu orang karyawan dapat menghasilkan enam unit nilai tambah, tahun 2002 turun menjadi 5,1 unit kemudian turun lagi menjadi 4,2 unit pada tahun 2003. Penurunan ini beralasan kalau diingat bahwa terjadinya akuisisi Satelindo di tahun 2001 dan 2002, dan merger Indosat, Satelindo, Bimagraha, dan IM3 di tahun 2003 yang menyebabkan inefisiensi biaya gaji karyawan. Pada 2004 diprediksikan rasio ini akan semakin mengecil karena adanya standarisasi gaji karyawan yang berasal dari Satelindo, Bimagraha, dan IM3.

Rasio pajak per nilai tambah yang mengukur peran pemerintah dalam perusahaan mengalami fluktuasi selama 2001-2003. Kenaikan rasio pada 2002 merupakan imbas langsung dari pajak atas keuntungan penjualan Telkomsel dalam Transaksi Kepemilikan Silang dengan PT Telkom. Lebih bayar pajak pada tahun 2003 sebagai akibat pembalikan kewajiban perpajakan Satelindo, Bimagraha, dan IM3 menyebabkan rasio pajak per nilai tambah menjadi negatif.

Rasio nilai tambah per penjualan secara sederhana mengukur berapa nilai tambah yang dapat dihasilkan dari setiap penjualan. Pada kasus indosat terlihat bahwa rasio ini cenderung stabil pada kisaran 50% walaupun rasio tahun 2001 relatif lebih tinggi. Rasio

50% ini menunjukkan bahwa dibutuhkan dua unit penjualan untuk menghasilkan satu unit nilai tambah.

Rasio nilai tambah per penyusutan cenderung stabil selama periode 2001-2003 walaupun rasio tahun 2001 relatif lebih tinggi. Rasio 2002 yang relatif paling rendah merupakan dampak langsung dari terjadinya kerusakan peralatan selular Satelindo. Rasio yang berkisar antara 203%-294% secara umum menggambarkan bahwa setiap penggunaan satu unit aktiva dapat menghasilkan dua unit nilai tambah.

Kesimpulan

Privatisasi Indosat yang banyak mengundang kontroversi ternyata membawa manfaat yang terlihat langsung pada laporan nilai tambah kepada karyawan dan kreditor. Karyawan menikmati manfaat dengan dilakukannya standarisasi gaji antara Indosat dengan Satelindo, Bimagraha dan IM3. Pemberi pinjaman menerima manfaat dari semakin besarnya pembayaran bunga karena Indosat menambah jumlah hutang jangka panjang dan obligasinya.

Penurunan porsi pemegang saham seperti yang tercermin dalam dividen 2002 merupakan konsekuensi langsung dari anjloknya laba bersih. Penurunan laba bersih ini merupakan suatu hal yang temporer mengingat sebab utamanya bukanlah karena kegiatan operasional Indosat. Pos-pos penyebab anjloknya laba bersih tersebut adalah amortisasi goodwill, penyisihan piutang bunga ragu-ragu obligasi konversi, penyesuaian piutang usaha dari PT Telkom, pos lain-lain – net, dan laba pra akuisisi.

Penurunan porsi nilai tambah pemerintah yang ditunjukkan dalam pajak merupakan abnormalitas yang terjadi pada tahun 2002 dan 2003 disebabkan oleh keuntungan penjualan Telkomsel dan pembalikan kewajiban pajak anak perusahaan. Perlu diingat pula bahwa pemerintah juga mempunyai hak atas sebagian dividen perusahaan sesuai dengan tingkat kepemilikan perusahaan BUMN ini selama 2001-2003.

Nilai tambah yang ditanam dalam perusahaan seperti yang ditunjukkan oleh pos laba ditahan cenderung turun persinya menunjukkan bahwa Indosat semakin mengutamakan *stakeholders*-nya.

Terlepas dari adanya beberapa kelemahan laporan nilai tambah dibandingkan dengan laporan keuangan konvensional, namun cukup bermanfaat dalam menganalisa kontribusi perusahaan terhadap para *stakeholders* langsung maupun tidak langsung.

Daftar Pustaka

Accounting Standards Steering Committee, *The Corporate Report* (London) Accounting Standards Steering Committee, 1975

Belkaoui, Ahmed, "Value Added Reporting," *The New Environment in International Accounting. Issues and Practices* (London: Quorum Books, 1988)

Burchell, Stuart, Colin Clubb dan Anthony G. Hopwood, "Accounting and Its Social Context: Towards a History of Value Added in The United Kingdom," *Accounting, Organization and Society* 10, no. 4(1985)

Choi, Frederik D. S. dan Gerhard G. Mueller, "Financial Reporting and Disclosure," *International Accounting*, 2nd ed. New Jersey, Prentice Hall, 1992

_____, Frederik D. S. dan Gerhard G. Mueller, *Frontiers of International Accounting: An Anthology*, ed (Ann Arbor, Michigan: UMI Research Press, 1985)

Cox, Bernard, *Value Added: An Application for Accountant Concerned with Industry* (London: Heinemann and the Institute of Cost and Management Accountants, 1978)

Gray, Sidney. J dan K. T. Maunders, *Value Added Reporting: Uses and Measurement* (London: Association of Certified Accountants, 1980)

Ikatan Akuntan Indonesia, PSAK No.25 Laba atau Rugi Bersih Untuk Periode Berjalan, Kesalahan Mendasar dan Perubahan Kebijakan Akuntansi, *Standar Akuntansi Keuangan, Buku Dua*, Salemba Empat, Jakarta, 1999

Indosat, Annual Report 2001

Indosat, Annual Report 2002

Indosat, Annual Report 2003

Morley, Michael F. "The Value Added Statement in Britain," *Accounting Review* (Juli 1979)

_____, Michael F., "The Value Added Reporting", dari *Development in Financial Reporting*, ed. Thomas A. Lee (London: Phillip Allan, 1981)

Rugles, Richard dan N. D. Rugles, *National Income Accounts and Income Analysis*, 2nd ed, New York, McGraw-Hill, 1965

Rutherford, B. A., "Published Statements of Value Added: A Survey of Three Years Experience," *Accounting & Business Research* (1980).

Smith, Jay M dan K. Fred Skousen, *Intermediate Accounting: Comprehensive Volume*, 10th ed, 1990